

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TONGKE TONGKE KABUPATEN SINJAI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Muh. Rizal Suyuti<sup>1\*</sup>, Maya Kasmita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Makassar

Author correspondence: rizalsuyuti@unm.ac.id\*, mayakasmita@um.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan Kawasan mangrove Tongk-tongke yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Tongke-tongke belum optimal dilakukan oleh pemerintah setempat karena masih adanya kesenjangan dalam pengelolaan kawasan tersebut seperti minimnya pelibatan UMKM, belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut, walaupun sudah ada kerjasama namun kerjasama itu belum melibatkan pihak lain sehingga berdampak pada masih lambatnya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan dan kerjasama bukan hanya Pemerintah dan Masyarakat tapi juga pihak lain seperti pihak swasta, organisasi yang peduli terhadap kawasan pesisir pantai dan organisasi lainnya adalah dengan menetapkan Kawasan tersebut sebagai lahan konservasi untuk melindungi Kawasan tersebut dari eksploitasi dan kerusakan yang berlebihan. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian kawasan dan bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan kawasan tongke tongke kepada seluruh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Kawasan Wisata; Perekonomian

**ABSTRACT.** This study aims to see the extent to which the management policy of the Tongk-tongke Mangrove Area carried out by the Sinjai Regency Government in order to improve the standard of living of the surrounding community. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and document collection. The results of the study indicate that the policy in the management of the Tongke-tongke Tourism Area has not been optimally carried out by the local government because there are still gaps in the management of the area such as minimal involvement of MSMEs, suboptimal management of coastal and marine areas, although there has been cooperation, the cooperation has not involved other parties so that it has an impact on the slow increase in the community's economy so that a policy and cooperation are needed not only the Government and Community but also other parties such as the private sector, organizations that care about coastal areas and other organizations by determining the Area as a conservation area to protect the Area from excessive exploitation and damage. Educating the community about the importance of maintaining the sustainability of the area and how to manage natural resources sustainably and campaigning for the importance of maintaining the environment of the Tongke Tongke area to the entire local community.

**Keywords:** Policy; Tourism Area; Economy

### PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan Pemerintah ditujukan untuk mengembangkan pariwisata sebagai industri utama dan unggulan dalam arti luas sehingga dapat dikatakan kebijakan itu diharapkan menjadi

sumber pendapatan devisa bagi sebuah negara, mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, meningkatkan pendapatan sebuah daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan, adanya peluang usaha masyarakat setempat

dengan tetap menjaga jati diri bangsa dan nilai-nilai agama serta dapat menjaga fungsi dan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kebijakan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan keadilan tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga akan berdampak pada generasi yang akan datang. Koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat penting dimana dengan adanya koordinasi tersebut akan menjadikan Kawasan wisata sebagai identitas wisatawan dalam persaingan global. Pengelolaan Kawasan mangrove adalah Sebagai satu bentuk pengembangan pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama (subyek) dalam pemanfaatan lahan mangrove sebagai areal pertambakan secara berkelanjutan; menumbuhkan dan mengembalikan tanggung jawab kepada masyarakat dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di lingkungan mereka (Witomo, 2019). Kawasan mangrove Tongke tongke merupakan salah Kawasan wisata yang berada di Kabupaten Sinjai.

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini ini adalah jenis kualitatif dengan bentuk pendekatan deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran dari suatu gejala dan untuk mencari sebab musabab dari gejala itu.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, dan Masyarakat Kawasan pesisir di Desa Tongke-Tongke dimana dalam penentuan informasi dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling) yaitu sebuah teknik pengambilan sampel, sumber data dengan pertimbangan, karakteristik tertentu seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diungkap. Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan, wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada para informan kunci (Key Informan) yang mengetahui masalah yang diteliti dengan berpedoman pada kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan serta dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Tongke-Tongke**

Tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir belum mencapai tingkat optimal dan berkelanjutan, sehingga perlu terus dilakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih optimal. Meskipun instansi terkait telah melakukan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan program pengembangan perikanan berupa pendistribusian tali dan sampan Viber yang dapat membantu masyarakat nelayan di desa Tongke-tongke, namun pemerintah setempat kurang menaruh perhatian terhadap wilayah pesisir dan laut. di desa Tongke-tongke. Permasalahan lainnya adalah

lahan tersebut belum dimanfaatkan sebagai kawasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah, padahal potensi pengembangan UMKM sangat penting dan potensial. Wilayah pesisir dapat dikelola secara terpadu untuk mendukung perencanaan wilayah pesisir dan laut secara cermat dan sistematis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, ilmu pengetahuan dan peluang usaha khususnya di sektor investasi wilayah pesisir (Thaha & Ilyas, 2018).

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya-upaya yang konkrit dan terukur dari pemerintah agar kesenjangan pengelolaan Kawasan Wisata Tongke-tongke dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Kondisi pengembangan kelompok masyarakat/ UKM ke depan perlu diupayakan lebih kondusif lagi untuk tumbuh dan berkembangnya UKM demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Daga *et al.*, 2021).

Kawasan pesisir merupakan wilayah yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan untuk memberikan nilai tambah baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau sudah menjelaskan dengan tegas tentang pengertian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yakni sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang kalau ditelisik lebih dalam semua akan berujung kepada pemanfaatan semua sumber

daya ada untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan adalah konsep normatif yang menyiratkan pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia.

Untuk lebih mendorong pemanfaatan Kawasan mangrove Tongke-tongke, ada beberapa hal yang dilakukan, yakni dengan menetapkan Kawasan tersebut sebagai lahan konservasi untuk memberikan perlindungan dari upaya eksploitasi dan kerusakan yang berlebihan. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian kawasan dan bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan kawasan Tongke-Tongke kepada seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat disekitar tapi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Sinjai termasuk para wisatawan yang selalu berkunjung.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong aktivitas ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan mangrove, seperti budidaya ikan berbasis mangrove atau pariwisata ekowisata. Memberikan pelatihan dan bantuan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan keterampilan dan usaha yang berkaitan dengan keunikan dari kawasan tersebut seperti kerajinan tangan dan pembudidayaan berbasis mangrove. Selain itu, untuk memberikan dampak nyata keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan kawasan tersebut maka dipandang perlu adanya pengembangan infrastruktur yang mendukung

aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat seperti perbaikan jalan, pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya serta memastikan pengawasan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara tegas.

Untuk memastikan pengelolaan kawasan Mangrove Tongke-tongke bukan hanya Pemerintah saja, namun menjadi tugas kita bersama sehingga sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non-Pemerintah (NGO), lembaga internasional, sektor swasta, serta masyarakat lokal untuk mendukung upaya pengembangan kawasan Mangrove Tongke-tongke dengan memberdayakan potensi yang ada di kawasan tersebut. Menurut Tuwo Ambo, (2011) kurang-berdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Selain itu, paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat diimplementasikan. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

#### **Kerjasama Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut di Desa Tongke-Tongke**

Dalam pengelolaan Kawasan Tongke-tongke dan sekitarnya, strategi yang digunakan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pantai antara lain melalui pemberdayaan yang dimulai dengan

perbaikan struktur sosial di daerah tersebut yang memungkinkan terjadinya aktifitas nelayan pada tingkat mikro-desa. Menurut (Najiyati, S., dkk., 2005) tentang prinsip pemberdayaan salah satunya yaitu partisipatif yang artinya program pemberdayaan yang sifatnya direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi namun perlu proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain sarana dan prasana yang harus didukung oleh desa infrastruktur lainnya juga harus diperhatikan dengan baik sehingga pemberdayaan yang diharapkan dapat terwujud. Perbaikan struktur social nelayan dilakukan melalui penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya berhimpun dalam suatu kelompok yang memperjuangkan kepentingan nelayan salah satunya KUB-PT Tenri Sangka kelompok-kelompok ini sangat berperan dalam pengembangan serta meningkatkan produksi perikanan sehingga dapat menambah pula pendapatan kabupaten Sinjai dimana hasil tangkapan nelayan Desa Tongke-Tongke ini kemudian di jual di kabupaten dan didaerah sekitarnya. Ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut (Witarsa, 2015). Dalam melakukan aktivitasnya Nelayan harus menaati aturan yakni dengan lengkapnya surat-surat kapal. Hal ini merupakan bentuk hubungan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat nelayan.

### **Dampak Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Desa Tongke-Tongke**

Pesisir dan laut sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pesisir dan laut Desa Tongke-Tongke dan kawasan pesisir menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar serta menggantungkan hidupnya kelaut. Laut, pesisir dan segala hal yang berada di dalamnya bernilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di Desa tersebut.

Dengan pengelolaan yang baik dari pemerintah akan berdampak pula pada pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia (I Gusti Ayu Yogi Iswari, 2019).

Dampak lain dari pengelolaan yang dirasakan itu seperti adanya kawasan wisata hutan mangrove yang membantu perekonomian masyarakat setempat dan dari peran masyarakat sendiri yang menjaga kebersihan ekosistem di kawasan pesisir sehingga masih memungkinkan untuk menangkap ikan di beberapa titik kawasan pesisir dan laut. Pengelolaan kawasan pesisir dan laut cukup membantu dalam mata pencaharian keluarganya, namun hal itu kurang berdampak kepada pendapatan perekonomian karena harga pasar yang mengalami penurunan dan kerugian akibat ulah tambang pasir yang beroperasi. kurang berdampak dalam kesejahteraan tingkat

perekonomiannya dikarenakan harga pasar yang kurang stabil dan ulah tambang pasir. Hal diatas menjelaskan bahwa kurangnya perhatian terhadap pengembangan sumberdaya pesisir terutama perhatian terhadap nelayan mengakibatkan tingkat kesejahteraan nelayan pesisir berkurang. Dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut perlu adanya perencanaan maka yang pertama perlu diperhatikan adalah menentukan tujuan perencanaan. Karena dengan adanya tujuan yang jelas maka perencanaan akan lebih terarah kedalam satu tujuan yang diharapkan yakni dampak kesejahteraan masyarakat pesisir.

kurangnya upaya pengelolaan kawasan pesisir dan laut sehingga berdampak pada pengrusakan kawasan pesisir yang berakibat langsung terhadap kurangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal lain yang didapat dari hasil penelitian ini bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tongke-Tongke masih kurang dikarenakan ketidakstabilan harga pemasaran ikan dan rumput laut serta tingkat pendidikan yang masih kurang pada masyarakat yang mendiami kawasan pesisir.

### **KESIMPULAN**

Pengelolaan Kawasan wisata Tongke Tongke perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada sehingga keberlangsungan dari kawasa tersebut tetap terjaga dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai

kepentingann yang sama dalam usaha melestarikann dan menetapkan Kawasan tersebut sebagai lahan konservasi serta sebagai media dari para pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya yang berarti akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

### PERNYATAAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pemerintah Kabupaten Sinjai dan Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan ruang dan dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian sehingga artikel ini dapat dipublikasikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2020). *Pengelolaan , Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia*. VIII (November), 1–27.
- Bengen, D. (2004). *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, IPB: Bogor.
- Dahuri, R., Rais J., Ginting S.P., dan Sitepu, M. . (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dahuri, R. (2001a). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>
- Dahuri, R. (2001b). Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Volume XVII No. 2 April - Juni 2001 : 139 – 171., XVII.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danusaputro, M. (1985). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Binacipta, 70.
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Fauzi, I., & Rauf, A. (2021). Kajian Perubahan Garis Pantai Dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Di Wilayah Pesisir Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai (The Study of Coastal Change by Using Remote Sensing Technology in the Coastal Area of East Sinjai Sub-District Sinj. 4(1), 36–47.
- Hajrah, A. (2016). Pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan bagi pengembangan kawasan pesisir di kecamatan galesong selatan kabupaten takalar. [Skripsi].
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 29.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Mohamad Soerjani, D. (1987). *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan*

- dalam *Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 13.
- Moleong, L. . (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nikijuluw. (2001). *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Bogor: Jurnal Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan PKSPL.
- Poernomosidhi. (2007). *Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana. Kebijakan Pengelolaan Ruang Wilayah Kawasan Pesisir Di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana*, Materi Seminar Nasional: Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir di Indonesia Sebagai Antisipasi Risiko Bencana. Bandung.
- Purwanto, Y. (2000). *Kawasan Pesisir*: 117–134.
- Rochimin Dahuri, dkk. (1996). *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta.
- Samad, M. S. dan B. (1993). *Manusia dalam Keresasian Lingkungan*. Jakarta: UI Press, 2.
- Suryadi. (2015). *Pengelolaan Lahan Pesisir Pantai Dusun Batulawang Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa* skripsi. [Skripsi] Univeritas Negeri Semarang, xiv,70. <http://lib.unnes.ac.id/20672/1/7101410037-s.pdf>
- Suryani, A. S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 171–187.
- Tjiptabudy, J. (2013). Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat. *Ambon: Jurnal Universitas Pattimura*.
- Tongke-togke, pemerintah desa. (n.d.). *Profil desa tongke-tongke*.
- Witomo, C. M. (2019). Pengelolaan wilayah pesisir dengan pendekatan instrumen ekonomi: Sebuah review teori dan peluang aplikasi. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 39–52.
- Wiyana. (2004). Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T). *Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPs 702)*. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Thaha, H., & Ilyas, M. (2018). Perilaku Beragama dan Etos Kerja Masyarakat Pesisir di Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1(1), 1-16.
- Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau

- Daga, R., Maddatuang, B., & Wahyuni, R. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Penggunaan E-Commerce pada Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 115-127.
- Ambo Tuwo. (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Brilian Internasional, Surabaya.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands Internasional -Indonesia Programme dan Wildlife.
- Witarsa. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Economia*, 26-46.
- I Gusti Ayu Yogi Iswari, Luh Indrayani, Kadek Rai Suwena (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya; *Jurnal Pendidikan Ekonomi*